

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sejak tahun 2001 setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

Penjabaran lebih lanjut mengenai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dalam bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai dasar hukum terbaru penyusunan LAKIP.

Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas maka disusun LAKIP Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada masa berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2010-2014, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BBPP Ketindan selama tahun 2010-2014.

B. Organisasi dan Tugas Fungsi

1. Organisasi dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPP Ketindan telah mengalami penyempurnaan dari Permentan Nomor:17/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 19 Pebruari Tahun 2007 ke Permentan Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober Tahun 2013. Konsekuensi dari penyempurnaan tersebut adalah naiknya eselon III dan IV di BBPP Ketindan dari eselon III b dan IV b menjadi eselon III a dan IV a. Dalam operasional kegiatan BBPP Ketindan didukung oleh 3 (tiga) unit kerja Eselon III dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Bagian Umum
 - a. Sub bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Perlengkapan dan Instalasi
2. Bidang Program dan Evaluasi
 - a. Seksi Program dan Kerjasama
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan
 - a. Seksi Pelatihan Aparatur
 - b. Seksi Pelatihan Non Aparatur
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing unit kerja Eselon III dan Kelompok Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga.
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- c. Subbagian Perlengkapan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, instalasi, dan sarana teknis.

Terjadi pergeseran tupoksi pada eselon IV dengan penyempurnaan Permentan Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, pada fungsi Promosi dan Publikasi saat ini menjadi Tugas Pokok dan fungsi pada Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga yang sebelumnya di Seksi Program dan Kerjasama. Sementara pada kegiatan Inkubator Agribisnis yang sebelumnya di Subbagian Perlengkapan dan instalasi menjadi tugas pokok dan Fungsi Seksi Pelatihan Non Aparatur menjadi kegiatan Inkubator Usahatani

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerjasama, dan identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) di bidang pertanian, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur di bidang pertanian, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi pelatihan, dan pelaporan.

Terjadi pergeseran tupoksi pada eselon IV dengan penyempurnaan Permentan Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, pada fungsi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan P4S saat ini menjadi Tugas Pokok dan fungsi pada Seksi Program dan Kerjasama yang sebelumnya pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a.pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- b. pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi bagi aparatur dan nonaparatur di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- c. pemberian pelayanan penyelenggaraan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis bagi aparatur dan nonaparatur;
- d. pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, serta pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur.
- b. Seksi Pelatihan Non aparatur mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan teknis bagi non aparatur di bidang tanaman pangan dan tanaman obat, serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mengalami sedikit pergeseran di dalam Permentan Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013, yaitu tersiratnya tugas pengembangan profesi dan inkubator usahatani dan hilangnya pengembangan DIKLAT kewirausahaan secara spesifik di unit eselon IV pada Seksi Pelatihan Non Aparatur.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus Widyaiswara;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional Widyaiswara mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- b. melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- c. melakukan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- d. melakukan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- e. melakukan uji kompetensi di bidang pertanian;

- f. melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- g. melakukan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- h. melakukan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- i. melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- j. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober Tahun 2013 sebagai penyempurnaan Permentan Nomor : 17/Permentan/OT.140/02/2007 19 Pebruari 2007, tentang tugas pokok Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) adalah *“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.”*. Berdasarkan tugas pokok tersebut, fungsi yang dijalankan oleh (BBPP) Ketindan meliputi :

- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan nonaparatur pertanian dalam dan luar negeri;

- f. pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan nonaparatur;
- g. pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur;
- m. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan nonaparatur pertanian;
- n. pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Ketindan.

3. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi yang menjadi bahan acuan analisis terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal baik yang bersifat positif maupun negatif. Lingkungan internal positif yaitu kekuatan (*strength*) dan lingkungan internal negatif yaitu kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan lingkungan eksternal positif yaitu peluang (*opportunities*) dan lingkungan eksternal negatif yaitu tantangan (*threats*). Secara rinci kelompok komponen tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan (*strength*)

- a. Memiliki program DIKLAT berbasis kompetensi kerja (*Competency Based Training*);
- b. Memiliki jenis DIKLAT yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- c. Mempunyai keahlian dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan DIKLAT terutama dibidang biofarmaka dan tanaman pangan;
- d. Mempunyai sarana dan prasarana DIKLAT yang memadai:
 - i. Terdapatnya 5 (lima) unit instalasi laboratorium yaitu laboratorium THP tanaman pangan, laboratorium THP obat, laboratorium bioteknologi dan kultur jaringan, laboratorium proteksi tanaman, laboratorium bio oil;
 - ii. *Screen house* dan lahan praktek;
 - iii. Sarana kelas untuk melaksanakan kegiatan DIKLAT secara paralel 4 – 5 kegiatan;
 - iv. Asrama dengan kapasitas 170 orang dan ruang makan dengan kapasitas 150 orang;
 - v. Fasilitas *sport center*.
- e. Kompetensi widyaiswara di berbagai ilmu pertanian yang berasal dari institusi pendidikan dalam dan luar negeri baik secara formal atau informal;
- f. Pola dan metodologi DIKLAT yang tepat sesuai kebutuhan sasaran kegiatan;
- g. Jejaring kerjasama yang baik dengan lembaga, instansi, praktisi dan petani sukses dan digunakan sebagai lokasi praktek lapangan penunjang juga narasumber/fasilitator/instruktur;
- h. Sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi Profesi bagi Penyuluh Pertanian/PP – PNS.
- i. Mempunyai tenaga penyelenggara DIKLAT yang tersertifikasi;
- j. Memiliki kualitas manajemen keDIKLATan terstandar internasional (ISO 9001:2008).

B. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Belum seluruh DIKLAT, dilaksanakan dengan menggunakan metoda DIKLAT berbasis kompetensi (*Competency Based Training*);
- b. Penataan pengembangan kelembagaan belum sepenuhnya mengacu pada master plan pengembangan balai;
- c. Sistem/aplikasi/pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dapat diaplikasi dan dukungan SDM yang berkemampuan Informasi dan Teknologi (IT) tinggi belum maksimal;
- d. Belum proporsionalnya jumlah sumberdaya manusia yang menyelenggarakan DIKLAT dengan tenaga/sumberdaya manusia penunjang ke DIKLATan;
- e. Belum terstandarnya/terakreditasinya 5 (lima) laboratorium yang ada di BBPP Ketindan;
- f. Terbatasnya lahan praktek di dalam BBPP Ketindan;
- g. Pengembangan model DIKLAT belum maksimal.

C. Peluang (*opportunities*)

- a. Masih banyaknya sasaran pelatihan aparatur dan non aparatur serta generasi muda pertanian yang memerlukan pelatihan;
- b. Banyaknya *stakeholder* yang ingin bekerja sama dalam hal DIKLAT teknis, profesi dan fungsional serta magang keahlian di bidang pengolahan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Adanya lembaga DIKLAT daerah (BDP) dan lembaga pelatihan/magang swadaya (P4S) yang menjadi binaan/mitra, untuk dikembangkan dan diberdayakan.

D. Tantangan (*threats*)

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan DIKLAT sesuai kebutuhan masyarakat Nasional dan Internasional;
- b. Adanya tuntutan peningkatan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi melalui kualifikasi manajemen yang akuntabel;

- c. Perencanaan dibentuknya/ditentukannya Balai pelatihan berskala internasional;
- d. Peningkatan profesionalisme tenaga fungsional di luar widyaiswara untuk proporsionalitas tenaga SDM structural dan fungsional dengan perbandingan 1:3.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi (Renstra)

Rencana strategi Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tahun 2010-2014 disusun dengan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BBPP Ketindan selama 5 tahun kedepan (2010-2014) adalah : “Menjadi lembaga pelatihan terpercaya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan pertanian untuk memantapkan SDM pertanian yang profesional.”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi kerja dan sistem informasi terintegrasi serta mengembangkan jejaring kerjasama melalui pelayanan pelatihan pertanian dan konsultasi agribisnis yang prima;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;
- c. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK);
- d. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK).
- e. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan;
- f. Mengembangkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen penatausahaan, keuangan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Ketindan selama lima tahun kedepan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi kerja dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan pertanian dan konsultasi agribisnis yang prima;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian internal secara akurat dan kredibel;
- c. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK);
- d. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK).
- e. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme ketenagaan;
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen penatausahaan, keuangan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.

4. Sasaran

Sasaran strategis yang ingin dicapai BBPP Ketindan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah

1. Pengembangan kelembagaan pelatihan

- a. Terakreditasinya program pelatihan mendukung pembangunan pertanian;
- b. Meningkatnya kualitas, kompetensi dan kapasitas P4S di wilayah binaan;
- c. Terasilitasinya pengembangan Balai sebagai Lembaga Diklat Profesi/Tempat Uji Kompetensi ;
- d. Berfungsinya Pusat Inkubator Agribisnis /Inkubator Usahatani sebagai Pusat Pelayanan Jasa konsultasi agribisnis;

- e. Berkembangnya 1 unit usaha produksi memanfaatkan sarana dan prasarana Balai;
- f. Tersusunnya *master plan* Balai dan tersedianya prasarana dan sarana pelatihan skala Nasional dan Internasional sesuai standar profesi;
- g. Terlaksananya sistem administrasi, manajemen dan tata kelola rumah tangga Balai setiap tahun;
- h. Tersedianya sistem informasi, promosi dan publikasi setiap tahun;

2. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program pembangunan pertanian

- a. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (juknis), modul, standar kompetensi kerja (SKK), dan paket pembelajaran berbasis multimedia;
- b. Terselenggaranya pelatihan teknis dan fungsional bagi Penyuluh Pertanian PNS, RIHP non Penyuluh dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja;
- c. Terselenggaranya pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi Penyuluh Swadaya/Instruktur/Pengelola P4S/Pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya;
- d. Tersertifikasinya sistem manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian berstandar internasional ISO 9001:2008;
- e. Pemantauan penerapan hasil DIKLAT serta bimbingan lanjutan terhadap alumni DIKLAT untuk mendukung program sukses pembangunan pertanian

3. Peningkatan kapasitas tenaga pelatihan pertanian.

- a. Tersedianya tenaga keDIKLATan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;

- b. Terpetakannya spesialisasi dan kompetensi widyaiswara sesuai bidang pengampuan dan tupoksi Balai;
- c. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme widyaiswara dan tenaga kediklatan/petugas sesuai standar profesi;
- d. Terselenggaranya pengiriman widyaiswara dan tenaga kediklatan dalam rangka kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri;
- e. Meningkatnya kompetensi kepemimpinan dan manajerial bagi tenaga keDIKLATan;
- f. Meningkatnya kompetensi tenaga instruktur P4S.

4. Peningkatan program jejaring kerjasama dan pelatihan pertanian.

- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyelenggarakan kerjasama pelatihan/magang bagi aparatur/non aparatur dan kerjasama penyediaan sarana prasarana/kunjungan/studi banding;
- b. Tersusunnya perencanaan pelatihan sesuai program;
- c. Terselenggaranya pelatihan/permagangan bertaraf internasional;
- d. Terselenggaranya kerjasama pelatihan/kemitraan dan fasilitasi Balai;
- e. Meningkatnya koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi program pelatihan dengan instansi terkait.

Rincian sasaran dan indikator sasaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Sasaran dan Indikator kinerja BBPP Ketindan
Tahun 2010 S/D 2014**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian	• Terakreditasinya 12 program DIKLAT; • Terklasifikasinya dan pembinaan 270 P4S; • Terfasilitasinya UPT menjadi lembaga DIKLAT profesi (LDP)/TUK 1 unit; • Terfasilitasinya 1 unit PIA, pendampingan tenant dan jasa konsultasi 100 orang; • Tersusunnya 3 dokumen masterplan • Terfasilitasinya sarana dan prasarana Balai; • Terlaksananya sistem administrasi dan tata kelola rumah tangga selama 60 bulan; • Tersusunnya 5 paket kegiatan hasil penyebaran informasi.
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian	• Terstandarnya kualitas 25 orang widyaiswara dan 90 orang petugas/tenaga keDIKLATan; • Terlaksananya 4 kegiatan pemetaan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara. • Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial tenaga keDIKLATan untuk 101 orang widyaiswara dan tenaga kediklatan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		• Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga keDIKLATan sejumlah 115 orang • Peningkatan kompetensi instruktur P4S 150 orang
3.	Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja	• Tersusunnya juklak, juknis, modul, materi, petunjuk lapangan, bahan ajar, sebanyak 233 DIKLAT; • Pengembangan multi media pelatihan sebanyak 180 angkatan; • Terlaksananya DIKLAT teknis agribisnis bagi PP, RIHP non penyuluh 13.227 orang; • Terlaksananya DIKLAT fungsional bagi 1.800 orang penyuluh pertanian; • Terlaksananya DIKLAT/magang teknis dan kewirausahaan bagi 9.496 orang petani; • Tersertifikasinya sistem manajemen mutu sebanyak 1 dokumen; • Terselenggaranya DIKLAT sesuai standar ISO sejumlah 233 DIKLAT • Terlaksananya monitoring dan evaluasi DIKLAT 569 angkatan
4.	Terfasilitasinya program kerjasama pelatihan pertanian	• Terselenggaranya kegiatan perencanaan DIKLAT sebanyak 5 kegiatan; • Tersedianya sistem informasi pelatihan pertanian berbasis Informasi Teknologi (IT) sebanyak 5 paket aplikasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		• Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi jejaring kerjasama sebanyak 5 kegiatan, 2.794 orang • Terlaksananya kerjasama pemanfaatan sarana prasarana Bali sejumlah 20.958 orang; • Terselenggaranya pelatihan dan permagangan bertaraf internasional sejumlah 5 kegiatan • Tersusunnya program, rencana kerja dan evaluasi yang sinergis dengan Eselon I, UPT Pusat dan atau Pemerintah Daerah sebanyak 20 dokumen.

Secara lebih rinci, sasaran dan indikator kinerja per tahun BBPP Ketindan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja BBPP Ketindan
Tahun 2010-2014 per tahun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian	1. Jumlah program pelatihan yang terakreditasi	4 Lat	2 Lat	2 Lat	4 Lat	2 Lat
		2. Jumlah P4S yang terklasifikasi kelembagaannya		70 P4S	70 P4S	75 P4S	75 P4S
		3. Jumlah lembaga PIA yang difasilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		4. Jumlah dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
		master plan					
		5. Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi dan tata kelola	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
		6. Jumlah dokumen dan kegiatan hasil penyebaran informasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		7. Jumlah sarana prasarana mendukung LDP TUK	-	-	3 Unit	3 Unit	1 Unit
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian	1. Jumlah Widyaiswara yang sesuai standar	14 WI	14 WI	20 WI	25 WI	25 WI
		2. Jumlah kegiatan pemetaan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		3. Jumlah widyaiswara dan tenaga kediklatan yang terfasilitasi dalam kegiatan pengembangan profesionalisme	90 Org	97 Org	103 Org	108 Org	115 Org
		4. Jumlah instruktur P4S yang terfasilitasi peningkatan kompetensi melalui DIKLAT/Magang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
3.	Terfasilitasinya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja	1. Jumlah dokumen juklak, juknis, modul, materi, petunjuk lapangan, bahan ajar, pengembangan multi media pelatihan	18 Judul	43 Judul	52 Judul	57 Judul	63 Judul
		2. Jumlah alumni diklat teknis agribisnis dan kewirausahaan bagi aparatur	1.365 Org	2.283 Org	2.493 Org	3.363 Org	3.723 Org
		3. Jumlah alumni diklat fungsional bagi aparatur	-	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org
		4. Jumlah alumni diklat non aparatur	1.460 Org	1.641 Org	1.970 Org	2.117 Org	2.308 Org
		5. Jumlah dokumen ISO	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		6. Monitoring dan evaluasi DIKLAT	26 akt	177 akt	122 akt	122 akt	122 akt
4.	Terfasilitasinya kerjasama, kemitraan pelatihan	1. Jumlah kegiatan identifikasi kebutuhan latihan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
		2. Jumlah paket aplikasi sistem informasi	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt
		3. Jumlah kegiatan sosialisasi dan koordinasi jejaring kerjasama	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
		4. Jumlah kegiatan pelatihan dan permagangan bertaraf internasional yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	2 Keg	2 Keg
		5. Jumlah dokumen perencanaan program yang dihasilkan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

5. Kebijakan/Strategi

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, maka ditetapkan kebijakan Balai sebagai berikut :

- a. Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pertanian guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan.;
- b. Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
- c. Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi;
- d. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan arah kebijakan Balai, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan dan pengembangan Pusat Pelatihan dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat pelatihan/permagangan bidang agribisnis bagi masyarakat tani;
- b. Penumbuhan wirausahawan muda dibidang agribisnis dilakukan melalui *agric training camp*, magang maupun pelatihan kewirausahaan pertanian;

- c. Penataan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk tata kelola administrasi dan manajemen penyelenggaraan pelatihan SDM pertanian dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi;
- d. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk komoditas unggulan dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah;

Selain strategi utama tersebut, BBPP Ketindan juga menetapkan strategi pelayanan kerjasama sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja pelayanan kerjasama (kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan) sesuai tugas pokok fungsi aparatur lingkup BBPP;
- b. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan kerjasama;
- c. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara periodik;
- d. Standarisasi persyaratan pelayanan teknis dan administrasi kerjasama yang diperlukan;
- e. Penetapan biaya pelayanan kerjasama yang transparan, akurat dan akuntabel;
- f. Peningkatan kenyamanan sarana prasarana dan keamanan lingkungan.

6. Program

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 setiap unit eselon I Kementerian Pertanian hanya mempunyai 1 (satu) program. Program BBPP Ketindan mengacu pada program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Program “Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani” dengan kegiatan meliputi :

- a. Pemantapan kelembagaan pelatihan.
- b. Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan.
- d. Peningkatan program dan kerjasama pelatihan pertanian.

7. Kegiatan

Berdasarkan program yang telah direncanakan, maka BBPP Ketindan pada tahun 2010-2014 melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan

- 1) Akreditasi program pelatihan;
- 2) Klasifikasi dan pembinaan lembaga pelatihan swadaya;
- 3) Fasilitasi pengembangan lembaga pelatihan pertanian menjadi Lembaga Diklat Profesi dan TUK;
- 4) Pengembangan Inkubator Agribisnis sebagai pusat pelayanan jasa konsultasi agribisnis;
- 5) Pengembangan masterplan sarana dan prasarana pelatihan;
- 6) Pengembangan sistem administrasi, manajemen dan tata kelola rumah tangga;
- 7) Pengembangan sistem informasi, promosi dan publikasi.

b. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian

- 1) Standarisasi jumlah dan mutu widyaiswara dan tenaga kediklatan;
- 2) Pemetaan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara;
- 3) Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial bagi tenaga keDIKLATan;
- 4) Peningkatan profesionalisme widyaiswara, tenaga kediklatan dan instruktur P4S.

c. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan

- 1) Pengembangan pedoman dan materi pelatihan pertanian;
- 2) Pengembangan pelatihan teknis agribisnis dan kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, RIHP non Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja;
- 3) Pengembangan pelatihan fungsional dan manajerial bagi pejabat lingkup pertanian berbasis reformasi birokrasi;
- 4) Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja; bagi penyuluh swadaya,

instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya;

- 5) Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan berdasarkan standar internasional (ISO).

d. Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan pertanian

- 1) Penyusunan rencana program DIKLAT;
- 2) Pengembangan data base pelatihan pertanian;
- 3) Pengembangan kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri;

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan kompetensi BBPP Ketindan dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengiriman Widyaiswara dalam rangka kerjasama pelatihan pertanian;
- b) Pengiriman tenaga kediklatan dalam rangka kerjasama pelatihan;
- c) Pengembangan pelatihan dan permagangan bertaraf internasional pada lembaga pelatihan pertanian;
- d) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu kepada Renstra BBPP Ketindan Tahun 2010-2014, maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPP Ketindan untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut Tabel 3) :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan BBPP Ketindan Tahun 2014

Unit Eselon I : BPPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Ketindan

Tahun : 2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya aparatur dan non aparatur dalam mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja	1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian	2.029 orang
		2. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	689 orang
2.	Tersedianya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	1. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	106 orang
3.	Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian	1. Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit
		2. Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	27 unit
4.	Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	17 dokumen
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1. Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan

C. Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan PPSDMP dan Kepala BBPP Ketindan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja BBPP Ketindan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 4. Penetapan Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2014

Unit Eselon I : BPPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Ketindan

Tahun : 2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	2.029 orang
		2. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	689 orang
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	1. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	106 orang
		- Jumlah Widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan	19 orang
		- Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan	33 orang
		- Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	54 orang
3.	Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian	1. Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit
		2. Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	27 unit

4.	Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	17 dokumen
5.	Terlaksananya Pelayanan erkantoran	1. Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan

Jumlah anggaran BBPP Ketindan dibawah Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2014 sebesar **Rp. 30.400.386.000.-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Dokumen penetapan kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi.

Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja BBPP Ketindan pada tahun 2013 disajikan pada Tabel 5 berikut ini.

DIAMBIL DARI FILE DOKUMEN KINERJA KIP 2014
Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja BBPP Ketindan Tahun 2013

Unit Eselon I : BPPSDMP

Unit Eselon II : BBPP Ketindan

Tahun : 2013

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian	2.029 orang	1.780 orang	87,73
		2. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	689 orang	618 orang	89,70
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	1. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	106 orang	168 orang	158,49
		- Jumlah Widyaiswara yang	19 orang	30 orang	157,89

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		difasilitasi dan dikembangkan			
		- Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan	33 orang	84 orang	254,55
		- Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	54 orang	54 orang	100
3.	Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian	1. Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit	1 unit	100
		2. Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	27 unit	33 unit	122,22
4.	Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	17 dokumen	18 dokumen	105,88
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1. Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100

B. Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian

Peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong dan hortikultura): diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah aparatur sektor pertanian yang meningkat kompetensinya dengan target 2.029 orang, terealisasi 1.780 orang **(87,73%)**. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 adanya kebijakan penghematan anggaran sehingga dilakukan revisi target pelatihan aparatur yang semula 2.029 orang menjadi 1.836 orang.

Sedangkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya dengan target 689 orang, tercapai 618 orang **(89,70%)**. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 adanya kebijakan penghematan anggaran sehingga dilakukan revisi target pelatihan non aparatur yang semula 689 orang menjadi 627 orang.

2. Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi

Peningkatan kinerja tenaga pelatihan pertanian diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong dan hortikultura): diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang meningkat kinerjanya dengan target 106 orang, terealisasi sebesar 168 orang (158,49%), yang terdiri dari widyaiswara 30 orang, tenaga teknis kediklatan 84 orang dan instruktur P4S 54 orang.

3. Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Tertatnya kelembagaan pelatihan pertanian yang diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan

swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong dan hortikultura): diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang dikembangkan dengan target 1 unit terealisasi 1 unit (100%).

Sedangkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi dengan target 27 unit terealisasi 33 unit P4S (122,22%).

4. Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)

Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong dan hortikultura): diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian dengan target 17 dokumen terealisasi 18 dokumen (105,88%), hal ini disebabkan karena adanya penambahan kegiatan.

5. Terlaksananya pelayanan perkantoran

Terlaksananya pelayanan perkantoran diarahkan untuk mendukung 4 sukses pembangunan pertanian yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi potong dan hortikultura): diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor; serta peningkatan ekonomi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran target 12 bulan terealisasi 12 bulan (100%).

C. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Anggaran Program Tahun 2013 berubah dari Rp. 30.400.386.000,- menjadi Rp. 28.035.998.000,- karena ada penghematan anggaran. Realisasi Anggaran tahun 2013 : **Rp. 26.984.985.302,- (96,25 %)**.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka secara proporsional angka realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 tampak lebih baik dan merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2008. Perkembangan realiasi serapan anggaran BBPP Ketindan selama 5 tahun terakhir seperti tampak pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran BBPP Ketindan
Tahun 2009-2013

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2009	16.566.791.000	14.393.975.715	86,88
2010	18.973.202.976	16.265.249.347	85,73
2011	28.362.237.000	24.432.173.133	86,14
2012	23.419.388.000	22.240.848.203	94,97
2013	28.035.998.000	26.984.985.302	96,25

TAMBAH 2014, TAHUN 2009 DELETE

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja kegiatan dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/input yang digunakan (Proporsi Output/Input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio output dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.

Berdasarkan masing-masing sasaran strategis hasil efisiensi capaian indikator kinerja dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 7 : Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Fisik/Output				Anggaran/Input		%	Efisiensi
			Target	Revisi Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi		
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan Pertanian	2.029	1.836	1.780	96,95	9.256.423.000	9.023.537.211	97,48	1,00
		2. Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Pertanian	689	627	618	98,56				
		Rata-rata				97,76				
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi	1. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	106	-	168	158,49	606.109.000	574.495.075	94,78	1,67
	Tertatanya kelembagaan Pelatihan Pertanian	1. Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi	1	-	1	100	498.615.000	467.786.399	93,82	1,18

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Fisik/Output				Anggaran/Input		%	Efisiensi
			Target	Revisi Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi		
3.		dan dikembangkan								
		2. Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	27	-	33	122,22				
		Rata-rata				111,11				
4.	Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)	1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	17	18	18	100	1.649.018.000	1.632.189.999	98,98	1,01
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	1. Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12	12	12	100	7.445.160.000	6.978.891.103	93,74	1,07

Dari keterangan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa efisiensi dari masing-masing sasaran strategis adalah :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian dengan efisiensi sebesar 1,00
2. Terasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi dengan efisiensi sebesar 1,67.
3. Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian dengan efisiensi sebesar 1,18.
4. Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK) dengan efisiensi sebesar 1,01.
5. Terlaksananya pelayanan perkantoran dengan efisiensi sebesar 1,07.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan (BBPP) Ketindan pada tahun 2013, antara lain :

1. Tidak tercapainya target peserta diklat disebabkan beberapa hal antara lain :
(a). Calon peserta diklat mempunyai kegiatan bersamaan; (b). Terlambatnya disposisi surat di instansi asal peserta;
2. Adanya penghematan anggaran yang secara langsung mengurangi jumlah dan jenis diklat;
3. Kurang seimbangnya antara peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang dimiliki BBPP Ketindan dengan jumlah kegiatan yang ada, guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah : (1). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja. (2). Segera menyusun jadwal palang secara lebih cermat setelah DIPA terbit. (3). Mengusulkan anggaran sarana dan prasarana diklat sesuai dengan rencana induk pengembangan balai (*Detail Engineering Design*) BBPP Ketindan.

BAB V

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPP Ketindan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPP Ketindan selama kurun waktu tahun 2010-2014. Pada tahun bersangkutan, BBPP Ketindan mempertanggungjawabkan target-target pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang telah disepakati oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Kinerja sasaran strategis BBPP Ketindan pada tahun 2013 dengan kisaran 87,73% sampai dengan 158,49 %. Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai **96,25%** atau sebesar Rp. 26.984.985.302,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 28.035.998.000. Capaian realisasi serapan anggaran BBPP Ketindan pada tahun 2013 sebesar 96,25% merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di BBPP Ketindan pada tahun 2013, antara lain : 1). Tidak tercapainya target peserta diklat disebabkan beberapa hal antara lain : (a). Calon peserta diklat mempunyai kegiatan bersamaan; (b). Terlambatnya disposisi surat di instansi asal peserta, 2). Adanya penghematan anggaran yang secara langsung mengurangi jumlah dan jenis diklat; dan 3). Kurang seimbangnya antara peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang dimiliki BBPP Ketindan dengan jumlah kegiatan yang ada, guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah : (1). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja. (2). Segera menyusun jadwal palang secara lebih cermat setelah DIPA diserahkan oleh Pusat. (3). Mengusulkan anggaran sarana dan prasarana diklat sesuai dengan rencana induk pengembangan balai (*Detail Engineering Design*) BBPP Ketindan.

Dengan mempertahankan capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013, disertai dengan antisipasi permasalahan yang sama di tahun mendatang, diharapkan BBPP Ketindan mampu meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.